



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1774, 2017

KEMENKEU. Dana Bagi Hasil. Cukai Hasil
Tembakau Provinsi/Kabupaten/Kota. TA 2017.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 192/PMK.07/2017

TENTANG

RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT

DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2017 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 yang didasarkan pada pagu alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, terdapat perubahan pagu alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2017, sehingga perlu mengatur kembali rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut daerah provinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang diatur oleh gubernur dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, persetujuan atas pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang diusulkan oleh gubernur kepada Menteri Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4755);
2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp2.949.744.450.000,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Penyaluran triwulan IV Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2017 ke setiap daerah provinsi/kabupaten/kota sebesar selisih antara rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dengan jumlah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2017 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.
- (2) Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2017 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 405), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN
 ANGGARAN 2017

RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2017

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
I	Total Provinsi Aceh	19.607.051
1	Provinsi Aceh	5.882.115
2	Kab. Aceh Barat	267.369
3	Kab. Aceh Besar	828.795
4	Kab. Aceh Selatan	267.369
5	Kab. Aceh Singkil	267.369
6	Kab. Aceh Tengah	608.152
7	Kab. Aceh Tenggara	267.369
8	Kab. Aceh Timur	340.916
9	Kab. Aceh Utara	267.369
10	Kab. Bireuen	267.369
11	Kab. Pidie	619.184
12	Kab. Simeulue	267.369
13	Kota Banda Aceh	267.369
14	Kota Sabang	267.369
15	Kota Langsa	267.369
16	Kota Lhokseumawe	267.369
17	Kab. Nagan Raya	267.369
18	Kab. Aceh Jaya	267.369
19	Kab. Aceh Barat Daya	267.369
20	Kab. Gayo Lues	4.797.908
21	Kab. Aceh Tamiang	267.369
22	Kab. Bener Meriah	1.738.323
23	Kab. Pidie Jaya	513.754
24	Kota Subulussalam	267.369
II	Total Provinsi Sumatera Utara	16.864.805
1	Provinsi Sumatera Utara	5.059.444

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
2	Kab. Asahan	210.810
3	Kab. Dairi	1.802.486
4	Kab. Deli Serdang	366.123
5	Kab. Karo	434.473
6	Kab. Labuhan Batu	210.810
7	Kab. Langkat	210.810
8	Kab. Mandailing Natal	363.909
9	Kab. Nias	210.810
10	Kab. Simalungun	210.810
11	Kab. Tapanuli Selatan	210.810
12	Kab. Tapanuli Tengah	210.810
13	Kab. Tapanuli Utara	296.299
14	Kab. Toba Samosir	210.810
15	Kota Binjai	210.810
16	Kota Medan	346.140
17	Kota Pematang Siantar	1.716.257
18	Kota Sibolga	210.810
19	Kota Tanjung Balai	210.810
20	Kota Tebing Tinggi	210.810
21	Kota Padang Sidempuan	210.810
22	Kab. Pakpak Bharat	355.088
23	Kab. Nias Selatan	210.810
24	Kab. Humbang Hasundutan	1.065.146
25	Kab. Serdang Bedagai	210.810
26	Kab. Samosir	210.810
27	Kab. Batu Bara	210.810
28	Kab. Padang Lawas Utara	210.810
29	Kab. Padang Lawas	210.810
30	Kab. Labuhan Batu Selatan	210.810
31	Kab. Labuhan Batu Utara	210.810
32	Kab. Nias Utara	210.810
33	Kab. Nias Barat	210.810
34	Kota Gunung Sitoli	210.810
III	Total Provinsi Sumatera Barat	14.285.371
1	Provinsi Sumatera Barat	4.285.611
2	Kab. Limapuluh Kota	2.940.404
3	Kab. Agam	841.450
4	Kab. Kepulauan Mentawai	238.090

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
5	Kab. Padang Pariaman	238.090
6	Kab. Pasaman	576.852
7	Kab. Pesisir Selatan	238.090
8	Kab. Sijunjung	238.090
9	Kab. Solok	605.343
10	Kab. Tanah Datar	946.567
11	Kota Bukit Tinggi	238.089
12	Kota Padang Panjang	238.089
13	Kota Padang	238.090
14	Kota Payakumbuh	632.070
15	Kota Sawahlunto	599.998
16	Kota Solok	238.089
17	Kota Pariaman	238.089
18	Kab. Pasaman Barat	238.090
19	Kab. Dharmasraya	238.090
20	Kab. Solok Selatan	238.090
IV	Total Provinsi Kepulauan Riau	6.031.534
1	Provinsi Kepulauan Riau	1.809.458
2	Kab. Bintan	301.577
3	Kab. Natuna	301.577
4	Kab. Karimun	301.577
5	Kota Batam	2.412.614
6	Kota Tanjung Pinang	301.577
7	Kab. Lingga	301.577
8	Kab. Kepulauan Anambas	301.577
V	Total Provinsi Jambi	8.468.063
1	Provinsi Jambi	2.540.419
2	Kab. Batanghari	254.042
3	Kab. Bungo	254.042
4	Kab. Kerinci	2.876.110
5	Kab. Merangin	562.482
6	Kab. Muaro Jambi	254.042
7	Kab. Sarolangun	254.042
8	Kab. Tanjung Jabung Barat	254.042
9	Kab. Tanjung Jabung Timur	254.042
10	Kab. Tebo	254.042
11	Kota Jambi	254.042
12	Kota Sungai Penuh	456.716

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
VI	Total Provinsi Sumatera Selatan	8.649.150
1	Provinsi Sumatera Selatan	2.594.747
2	Kab. Lahat	162.171
3	Kab. Musi Banyuasin	162.171
4	Kab. Musi Rawas	162.171
5	Kab. Muara Enim	162.171
6	Kab. Ogan Komering Ilir	162.171
7	Kab. Ogan Komering Ulu	162.171
8	Kota Palembang	162.171
9	Kota Pagar Alam	162.171
10	Kota Lubuk Linggau	162.171
11	Kota Prabumulih	162.171
12	Kab. Banyuasin	162.171
13	Kab. Ogan Ilir	162.171
14	Kab. OKU Timur	423.143
15	Kab. OKU Selatan	3.198.695
16	Kab. Empat Lawang	162.171
17	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	162.171
18	Kab. Musi Rawas Utara	162.171
VII	Total Provinsi Lampung	12.099.081
1	Provinsi Lampung	3.629.727
2	Kab. Lampung Barat	3.299.839
3	Kab. Lampung Selatan	357.043
4	Kab. Lampung Tengah	449.950
5	Kab. Lampung Utara	331.325
6	Kab. Lampung Timur	829.710
7	Kab. Tanggamus	438.408
8	Kab. Tulang Bawang	241.981
9	Kab. Way Kanan	241.981
10	Kota Bandar Lampung	241.981
11	Kota Metro	264.136
12	Kab. Pesawaran	490.722
13	Kab. Pringsewu	556.335
14	Kab. Mesuji	241.981
15	Kab. Tulang Bawang Barat	241.981
16	Kab. Pesisir Barat	241.981
VIII	Total Provinsi Jawa Barat	340.548.267
1	Provinsi Jawa Barat	102.164.480

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
2	Kab. Bandung	11.370.459
3	Kab. Bekasi	4.112.585
4	Kab. Bogor	4.134.330
5	Kab. Ciamis	4.412.289
6	Kab. Cianjur	4.405.165
7	Kab. Cirebon	4.860.587
8	Kab. Garut	25.049.123
9	Kab. Indramayu	4.156.012
10	Kab. Karawang	80.114.086
11	Kab. Kuningan	5.349.711
12	Kab. Majalengka	9.713.508
13	Kab. Purwakarta	4.133.866
14	Kab. Subang	4.225.479
15	Kab. Sukabumi	4.155.504
16	Kab. Sumedang	18.187.467
17	Kab. Tasikmalaya	4.311.510
18	Kota Bandung	4.059.636
19	Kota Bekasi	4.058.921
20	Kota Bogor	4.096.944
21	Kota Cirebon	4.098.923
22	Kota Depok	4.062.228
23	Kota Sukabumi	4.108.593
24	Kota Cimahi	4.079.331
25	Kota Tasikmalaya	4.120.238
26	Kota Banjar	4.124.805
27	Kab. Bandung Barat	4.734.486
28	Kab. Pangandaran	4.148.001
IX	Total Provinsi Jawa Tengah	679.564.935
1	Provinsi Jawa Tengah	203.869.482
2	Kab. Banjarnegara	6.557.783
3	Kab. Banyumas	5.996.161
4	Kab. Batang	6.184.338
5	Kab. Blora	8.945.119
6	Kab. Boyolali	17.375.703
7	Kab. Brebes	6.328.870
8	Kab. Cilacap	6.107.635
9	Kab. Demak	13.242.563
10	Kab. Grobogan	8.726.516

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
11	Kab. Jepara	6.341.563
12	Kab. Karanganyar	9.674.359
13	Kab. Kebumen	7.608.984
14	Kab. Kendal	20.995.914
15	Kab. Klaten	15.666.717
16	Kab. Kudus	150.987.427
17	Kab. Magelang	16.077.626
18	Kab. Pati	6.281.252
19	Kab. Pekalongan	6.042.185
20	Kab. Pemalang	6.892.096
21	Kab. Purbalingga	6.662.989
22	Kab. Purworejo	7.318.821
23	Kab. Rembang	15.491.440
24	Kab. Semarang	8.670.914
25	Kab. Sragen	7.069.588
26	Kab. Sukoharjo	7.107.935
27	Kab. Tegal	6.488.880
28	Kab. Temanggung	31.208.235
29	Kab. Wonogiri	6.936.064
30	Kab. Wonosobo	12.828.183
31	Kota Magelang	6.089.703
32	Kota Pekalongan	7.242.207
33	Kota Salatiga	5.997.012
34	Kota Semarang	7.968.115
35	Kota Surakarta	6.586.395
36	Kota Tegal	5.996.161
X	Total Provinsi D.I. Yogyakarta	19.799.429
1	Provinsi D.I. Yogyakarta	5.939.829
2	Kab. Bantul	4.280.803
3	Kab. Gunung Kidul	1.776.932
4	Kab. Kulon Progo	2.194.941
5	Kab. Sleman	4.113.338
6	Kota Yogyakarta	1.493.586
XI	Total Provinsi Jawa Timur	1.530.118.419
1	Provinsi Jawa Timur	459.035.526
2	Kab. Bangkalan	13.511.744
3	Kab. Banyuwangi	15.412.213
4	Kab. Blitar	16.963.020

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
5	Kab. Bojonegoro	34.514.822
6	Kab. Bondowoso	26.510.652
7	Kab. Gresik	13.475.514
8	Kab. Jember	63.019.946
9	Kab. Jombang	29.607.693
10	Kab. Kediri	34.496.118
11	Kab. Lamongan	33.024.059
12	Kab. Lumajang	18.730.915
13	Kab. Madiun	13.943.520
14	Kab. Magetan	14.121.179
15	Kab. Malang	68.044.673
16	Kab. Mojokerto	14.066.896
17	Kab. Nganjuk	18.273.394
18	Kab. Ngawi	19.351.911
19	Kab. Pacitan	13.682.676
20	Kab. Pamekasan	42.327.525
21	Kab. Pasuruan	177.347.361
22	Kab. Ponorogo	15.119.088
23	Kab. Probolinggo	48.044.858
24	Kab. Sampang	17.968.361
25	Kab. Sidoarjo	13.492.423
26	Kab. Situbondo	26.163.116
27	Kab. Sumenep	32.354.057
28	Kab. Trenggalek	13.598.471
29	Kab. Tuban	17.840.892
30	Kab. Tulungagung	17.929.254
31	Kota Blitar	14.069.282
32	Kota Kediri	57.774.403
33	Kota Madiun	13.292.183
34	Kota Malang	26.984.591
35	Kota Mojokerto	13.911.522
36	Kota Pasuruan	13.315.445
37	Kota Probolinggo	13.382.407
38	Kota Surabaya	22.791.159
39	Kota Batu	12.625.550
XII	Total Provinsi Sulawesi Tengah	7.692.369
1	Provinsi Sulawesi Tengah	2.307.709
2	Kab. Banggai	1.230.779

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
3	Kab. Banggai Kepulauan	209.792
4	Kab. Buol	209.792
5	Kab. Toli-Toli	209.792
6	Kab. Donggala	209.792
7	Kab. Morowali	209.792
8	Kab. Poso	209.792
9	Kota Palu	1.846.169
10	Kab. Parigi Moutong	209.792
11	Kab. Tojo Una Una	209.792
12	Kab. Sigi	209.792
13	Kab. Banggai Laut	209.792
14	Kab. Morowali Utara	209.792
XIII	Total Provinsi Sulawesi Selatan	17.952.745
1	Provinsi Sulawesi Selatan	5.387.745
2	Kab. Bantaeng	287.000
3	Kab. Barru	252.000
4	Kab. Bone	1.131.000
5	Kab. Bulukumba	398.000
6	Kab. Enrekang	234.000
7	Kab. Gowa	234.000
8	Kab. Jeneponto	252.000
9	Kab. Luwu	234.000
10	Kab. Luwu Utara	234.000
11	Kab. Maros	234.000
12	Kab. Pangkajene Kepulauan	234.000
13	Kab. Pinrang	234.000
14	Kab. Selayar	234.000
15	Kab. Sidenreng Rappang	234.000
16	Kab. Sinjai	1.785.000
17	Kab. Soppeng	4.468.000
18	Kab. Takalar	234.000
19	Kab. Tana Toraja	234.000
20	Kab. Wajo	248.000
21	Kota Pare-pare	234.000
22	Kota Makassar	234.000
23	Kota Palopo	234.000
24	Kab. Luwu Timur	234.000
25	Kab. Toraja Utara	234.000

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
XIV	Total Provinsi Bali	12.012.363
1	Provinsi Bali	3.603.708
2	Kab. Badung	450.464
3	Kab. Bangli	508.305
4	Kab. Buleleng	3.287.675
5	Kab. Gianyar	1.761.551
6	Kab. Jembrana	502.387
7	Kab. Karangasem	546.881
8	Kab. Klungkung	450.464
9	Kab. Tabanan	450.464
10	Kota Denpasar	450.464
XV	Total Provinsi Nusa Tenggara Barat	232.036.378
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	69.610.913
2	Kab. Bima	7.824.402
3	Kab. Dompu	4.888.875
4	Kab. Lombok Barat	12.453.185
5	Kab. Lombok Tengah	38.212.836
6	Kab. Lombok Timur	52.729.890
7	Kab. Sumbawa	7.816.272
8	Kota Mataram	26.611.618
9	Kota Bima	1.648.399
10	Kab. Sumbawa Barat	2.378.214
11	Kab. Lombok Utara	7.861.774
XVI	Total Provinsi Nusa Tenggara Timur	16.901.129
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.070.338
2	Kab. Alor	241.445
3	Kab. Belu	241.445
4	Kab. Malaka	241.445
5	Kab. Ende	241.445
6	Kab. Flores Timur	1.328.844
7	Kab. Kupang	303.145
8	Kab. Lembata	241.445
9	Kab. Manggarai	2.079.614
10	Kab. Ngada	248.476
11	Kab. Sikka	849.462
12	Kab. Sumba Barat	364.793
13	Kab. Sumba Timur	403.601
14	Kab. Timor Tengah Selatan	269.625

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
15	Kab. Timor Tengah Utara	241.445
16	Kota Kupang	241.445
17	Kab. Rote Ndao	241.445
18	Kab. Manggarai Barat	486.396
19	Kab. Nagekeo	726.114
20	Kab. Sumba Barat Daya	1.748.271
21	Kab. Sumba Tengah	241.445
22	Kab. Manggarai Timur	608.000
23	Kab. Sabu Raijua	241.445
XVII	Total Provinsi Kalimantan Tengah	7.113.361
1	Provinsi Kalimantan Tengah	2.134.005
2	Kota Palangkaraya	576.044
3	Kab. Pulang Pisau	1.122.256
4	Kab. Kapuas	194.001
5	Kab. Gunung Mas	194.001
6	Kab. Barito Selatan	194.001
7	Kab. Barito Timur	194.001
8	Kab. Barito Utara	194.001
9	Kab. Murung Raya	194.001
10	Kab. Katingan	194.001
11	Kab. Kotawaringin Timur	194.001
12	Kab. Seruyan	194.001
13	Kab. Kotawaringin Barat	1.147.045
14	Kab. Lamandau	194.001
15	Kab. Sukamara	194.001
	Total	2.949.744.450

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI